



Bali Post/kmb31

PROYEK - Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono saat mengecek peta lahan eks galian C guna melihat posisi lokasi proyek Dermaga Gunaksa dan aliran air Tukad Unda di ruang rapat Bupati Klungkung.

Kanalisisasi Tukad Unda Terhambat Pembebasan Lahan

Semarangapura (Bali Post) -

Hambatan pembangunan Dermaga Gunaksa tidak hanya datang dari lautan. Tukad Unda yang memiliki debit air cukup tinggi juga cukup menjadi penghambat. Menyelesaikan kanalisasi di hilir Tukad Unda juga tidak mudah. Sebab, prosesnya masih menunggu pendataan lahan di eks galian C secara menyeluruh.

Bupati Klungkung Nyoman Suwirta, Kamis (9/4) kemarin mengatakan, pihaknya sedang melakukan pendataan seluruh lahan eks galian C. Tahap sosialisasi sudah selesai dilakukan. Saat ini, tinggal proses pendataan yang memerlukan waktu cukup lama dan ditargetkan rampung tahun ini.

"Proses pembangunan kanalisasi Tukad Unda harus diawali dari proses pendataan lahan. Sebab, di alur yang rencananya

akan dibangun, masih belum jelas kepemilikan lahannya," tegas Bupati Suwirta.

Kanalisisasi Tukad Unda rencananya akan dibangun sepanjang 2 km dengan lebar 100 meter. Total, menghabiskan lahan seluas 20 hektar.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Ketut Artika, yang hadir saat kunjungan lapangan Dirjen Perhubungan Darat, mengatakan sudah berkomunikasi dengan pihak Balai Sungai Wilayah Bali-Penida, terkait dengan rencana kanalisasi Tukad Unda. Tahun ini, katanya proses kanalisasi Tukad Unda sedang dalam tahap penyusunan DED (*Detail Engeneering Design*). "Rencananya, DED kanalisasi Tukad Unda sudah selesai tahun ini," katanya. Sehingga tahun depan proses tahapan pembangunan fisik bisa dilakukan.

Kanalisisasi itu akan dibuat di sisi barat lokasi proyek Dermaga Gunaksa. Untuk mematangkan proses pembangunan kanalisasi, Bupati Suwirta berencana mengundang pihak balai dalam waktu dekat.

Selama proses kanalisasi Tukad Unda belum bisa diselesaikan, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Djoko Sasono mengaku pemerintah pusat dan daerah tidak akan bisa tidur nyenyak saat hujan turun. Sebab, debit air Tukad Unda saat meluap cukup tinggi. Jika tidak diatur, maka debit air itu bakal mengancam keberadaan lokasi proyek Dermaga Gunaksa. "Ancamannya dari laut dan sungai, lokasi proyek ini ada di tengah-tengah. Ini berbahaya. Kita perlu dorong proses kanalisasi dipercepat," tegasnya. (kmb31)

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 16



DAK Rp 15,8 Miliar Terancam Hangus

★ Terkendala Petunjuk Teknis, Waktu Tender Sempit

Tahun lalu DAK sebesar Rp 2 miliar, juga tidak terpakai untuk pengadaan alat peraga di SD dan SMP karena sempitnya waktu penyelenggaraan tender.

AMLAPURA, NusaBali

Meski di Karangasem ada anggaran besar yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun

Pendidikan Dasar Disdikpora Karangasem I Gusti Bagus Budiadnyana didampingi Kasi Sarana dan Prasarana I Nyoman Soka Wijaya mengakui pihaknya belum mampu melaksanakan tender, di Amlapura, Kamis (09/4).

Diharapkan Permendirjen bisa turun April 2015 ini, sehingga langsung melakukan persiapan tender, berkoordinasi dengan ULP (unit lembaga pengadaan), di bawah pimpinan Kabag PP (Pengendalian Pembangunan) I Nyoman Tantra yang terbagi enam ULP, masing-masing: jasa konsultasi ULP (unit lembaga pengadaan) (1 ULP), pengadaan barang dan jasa (2 ULP) dan jasa

ruang kelas, dan yang kondisinya baik 412 ruang kelas.

Sebelumnya, delapan KUPT Disdikpora se-Karangasem telah mendata gedung-gedung SD dan SMP yang rusak, telah pula ditindaklanjuti proposal agar segera mendapatkan bantuan rehab. Seperti diutarakan KPUT Kecamatan Kubu Ni Nengah Sari, telah mendata 12 gedung SD yang rusak berat, yakni: SD Negeri 2 Ban, SDN 5 Ban, SDN 6 Ban, SDN 8 Ban, SDN 2 Baturinggih, SDN 4 Baturinggih, SDN 2 Tianyar Barat, SDN 5 Tianyar Barat, SDN 6 Tianyar Barat, SDN 8 Tianyar Barat, SDN 3 Sukadana dan SDN 4 Sukadana. **K16**

2015, sebesar Rp 15,8 miliar, namun tak serta merta bisa segera digunakan untuk pembangunan. Sebab, realisasinya terkendala belum adanya petunjuk teknis. Sehingga tender belum bisa segera terlaksana, dan dananya pun terancam hangus. Hanya juknis Permendikbud No 09 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penggunaan DAK, yang telah turun tetapi belum ditindaklanjuti Permendirjen.

Padahal DAK tahun lalu, sebesar Rp 2 miliar, juga tidak terpakai untuk pengadaan alat peraga di SD dan SMP, mengingat sempitnya waktu penyelenggaraan tender. Kepala Bidang

konstruksi (3 ULP).

Untuk lelang bersumber dari DAK tahun ini katanya, nilainya Rp 11 miliar untuk mendanai pembiayaan 68 SD dan Rp 4,8 miliar untuk 10 SMP. "Dana itu hanya 80 persen untuk perbaikan fisik dan 20 persen untuk meningkatkan mutu sekolah," katanya.

Sedangkan kondisi gedung SD dan SMP di Karangasem, banyak yang keropos. Untuk gedung SD misalnya, dari 358 SD, memiliki 37 ruang kelas yang rusak berat, 119 ruang kelas rusak ringan, sedangkan dalam kondisi baik 2.299 ruang kelas. Kondisi gedung 45 SMP, yang rusak berat 16 ruang kelas, rusak ringan 109

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 8



Desain Proyek Basement IRD RSUD Buleleng Berubah

SINGARAJA,
NusaBali

Belum genap sebulan proyek prestise berupa pembangunan gedung IRD RSUD Buleleng digarap, mulai ada perubahan desain. Dinding tembok di bagian basement sebelah timur yang semestinya memakai pasangan batu kali, kini diganti dengan pasangan borfile yang dikombinasi dengan pasangan batako.



• NUSABALI/SUDIRTA
KOMISI II DPRD Buleleng memantau proyek pembangunan IRD RSUD Buleleng Rabu (8/4).

Perubahan desain itu terungkap ketika pimpinan DPRD Buleleng dan Komisi II DPRD Buleleng meninjau proyek tersebut, Rabu (8/4) pagi. Pimpinan DPRD yang hadir adalah Wakil Ketua DPRD Made Adi Purnawijaya dan Ketua Komisi II, Putu Mangku Budiasa. Di lokasi rombongan DPRD diterima oleh Site Engeenering PT Tunas Jaya Sanur Ketut Suardana didampingi oleh Site Manejer Proyek IRD RSUD I Nyoman Astika. Selain itu, Direktur Utama (Dirut) RSUD Buleleng Made Widiartana didampingi oleh PPTK Proyek IRD RSUD.

Dalam pertemuan, berdasar-

kan dokumen Detail Engeenering Design (DED), dinding tembok basement di sisi timur memakai pasangan batu kali. Namun lantaran ada kendala, pemasangan batu kali itu tidak bisa dikerjakan. Kendala itu berupa lahan di sisi timur masih ada bangunan rumah sakit. Bahkan posisi lahan dan bangunan itu berada lebih tinggi dibanding dengan lahan yang dibangun IRD sekarang. Nah lahan dan bangunan di sisi timur itu selama ini sudah disender dengan batu kali. Jika lahan dibagian bawahnya digali untuk bisa pasang batu kali, dikhawatirkan senderan dan bangunan rumah sakit yang ada di lahan itu akan longsor. Akhirnya diputuskan memakai pa-

sangan borfile yang dikombinasi dengan pasangan batako.

Site Engeenering Proyek Ketut Suardana menjelaskan, perubahan desain dinding tembok basement itu sudah berdasarkan kajian dan kesepakatan pihak yang terkait dalam proyek ini. Dikatakan, semula pihaknya mencoba dengan cara lain dengan memasang tiang pancang, agar bisa memasang batu kali sesuai dengan DED. Namun pema-

sangan tiang pancang ini pun mengalami kendala. Beton tiang panjang sulit menembus tanah yang berbatu dan bahkan tiang pancang yang dipasang patah. "Sudah semua ada kajiannya dan sudah disepakati merubah dan itu semua ada dokumennya. Desain batu kali seperti DED anggaran diperlukan sekitar Rp 1 miliar dan dengan borfile ini biaya lebih murah Rp 280 juta, sehingga ada penghematan anggaran," tegasnya.

Terkait realisasi pekerjaan, lanjut Suardana saat ini pihaknya telah mengerjakan volume pekerjaan sekitar 2,80 persen. Pekerjaan ini masih tahap pada konstruksi basement dan untuk pekerjaan konstruksi basement

ini ditargetkan kelar paling lambat bulan ini. Sementara kendala di lapangan tidak dialami dan untuk mengejar target di lapangan, pihaknya mulai memberlakukan tambahan jam kerja (lembur) untuk pekerjaanya.

Sementara Ketua Komisi II Putu Mangku Budiasa didampingi Wakil Ketua DPRD Buleleng Made Adi Purna Wijaya mengatakan, perubahan desain untuk tembok basement itu dapat diterima. Dokumen tentang perubahan desain termasuk kajian teknis pekerjaan tembok basement itu diharapkan segera disempurnakan dengan DED yang sudah ada. "Pada prinsipnya kami menerima, tapi perubahan desain itu segera disesuaikan dengan DED

yang ada," katanya.

Mangku Budiasa juga menyebut, pengawasan yang dilakukan ini bukan untuk mencari kesalahan pihak pelaksana atau pemerintah. Sebaliknya, dewan berkomitmen untuk ikut mengawasi pembangunan dan proyek IGD yang merupakan proyek prestisius ini bisa berjalan dan sesuai dengan perencanaan dalam DED yang sudah disusun sebelumnya. "Pada prinsipnya kami berkomitmen bersama pemerintah agar proyek ini berjalan sesuai DED yang sudah ada. Makanya kami ikut mengawasi dan bukan mencari kesalahan pihak tertentu," tegasnya. **K19**

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 4



Dewan Terpidana Kasus Bansos

Siapkan Banding

“Semestinya dua kelian dadia ikut jadi tersangka dalam kasus ini”.

GIANYAR, NusaBali

Tim kuasa hukum tersangka anggota DPRD Gianyar dari Fraksi PDIP, Ngakan Putu Tirta Pramono, kini menyiapkan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Denpasar yang menghukum Ngakan Pramono 2 tahun penjara. Salah satu landasan yuridis untuk langkah banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Bali yakni Permendagri No 32 Tahun 2012 yang mengatur tentang mekanisme pencairan dana bansos yang menjadi objek perkara.

Hal itu dikatakan salah seorang kuasa hukum Ngakan Pramono, Ngakan Kompyang Dirga SH saat dihubungi di Gianyar, Kamis (9/4). Sebagaimana diberitakan, Kamis (9/4), dalam sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (8/4), Ngakan Pramono divonis 2 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsidi 2 bulan kurungan. Hukuman ini lebih tinggi setengah tahun dari tuntutan JPU (jaksa penuntut umum) Kejari Gianyar, 1,5 tahun penjara. Sesuai ketentuan persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk pikir-pikir selama 7 hari sejak dikeluarkannya putusan itu.

Kompyang Dirga menjelaskan, seharusnya hakim Pengadilan Tipikor mengacu Permendagri No 32 Tahun 2012 tersebut. Den-

gan ketentuan ini, kliennya tak tersangkut dalam mekanisme pencairan hibah dana bansos itu. Dana dimaksud, kata dia, jelas-jelas diterima oleh pihak penerima sesuai proposal yakni Kelian Pura Dadia Pulasari dan Pura Dadia Cemeng di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar. “Semestinya dua kelian ini ikut jadi tersangka atau didakwa dalam kasus ini. Karena, kan mereka yang telah menandatangani penerimaan hibah dana bansos ini. Tapi kami tetap menghormati keputusan hakim,” ujarnya.

Kompyang Dirga menambahkan, terkait rencana akan melakukan banding tersebut, pihaknya telah merembukkan dengan keluarga terdakwa, termasuk ayah angkatnya, Ngakan Gde Padma SH yang Perbekel Desa Keliki. Pihaknya mem-

gelapan hibah dana bansos Rp 100 juta, Ngakan Pramono. Penahanan anggota DPRD asal Banjar/Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ini di Rumah Tahanan (Rutan) Gianyar sejak Senin (29/12/2014) sekitar pukul 12.15 Wita.

Modus kasus ini, bendahara Pemkab Gianyar menyerahkan uang dana bansos masing-masing Rp 50 juta pada dua rekening milik Kelian Pura Dadia Pulasari dan Dadia Pura Ceneng di Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Gianyar tahun 2013. Selanjutnya dana bansos hibah yang prosesnya dibantu Ngakan Pramono selaku anggota Dewan ini diduga dipotong sendiri oleh Ngakan Pramono masing-masing Rp 45 juta. Sisanya masing-masing Rp 5 juta diserahkan kepada dua kelian pura dadia itu. **Isa**

bantah mengatakan, langkah banding nanti untuk menunda pemecatan Ngakan Pramono selaku anggota DPRD Gianyar dari Fraksi PDIP Gianyar. “Tidak ada istilah itu (penundaan untuk hindari pemecatan.Red). Ini murni masalah proses penegakkan hukum dan pencarian keadilan setiap orang,” jelasnya.

Saat ditanya tentang keyakinan untuk bisa memenangkan perkara di tingkat banding nanti, Kompyang Dirga mengaku, tak bisa memastikan. Alasannya, menangkalah di pengadilan bukan ditentukan kuasa hukum. Namun selaku kuasa hukum, pihaknya mengaku berhak dan wajib mengupayakan perjuangan penegakkan hukum yang seadil-adilnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar menahan tersangka kasus dugaan peng-

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 6



Mantan Bupati Tolak ✓ Keterangan Saksi PPATK

★ Terdakwa Tim 9 Sidang Perdana Hari Ini

DENPASAR, NusaBali

Dua saksi ahli dari PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dengan terdakwa mantan Bupati Klungkung Wayan Candra di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (9/4). Terdakwa tolak keterangan kedua saksi ahli itu, Muhammad Novian (dari PPATK) dan Doso Sukendra (dari BPKP), karena mereka dianggap melakukan



Saksi ahli dari PPATK, Muhammad Novian, berikan keterangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis (9/4).

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

analisis hanya menggunakan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik.

Saksi ahli dari PPATK, Muhammad Novian, yang dihadirkan pertama dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Kamis kemarin, mengungkap adanya puluhan transaksi mencurigakan di rekening pribadi milik terdakwa. Namun, saat ditanya sumber dana dalam transaksi tersebut, saksi tak bisa menjelaskannya. Ketika didesak kuasa hukum terdakwa, Suryatin Lijaya, saksi ahli akhirnya mengakui jika melakukan analisis hanya berdasarkan resume dari penyidik.

Hal ini sempat membuat perdebatan di persidangan kemarin, karena tim kuasa hukum terdakwa meragukan keterangan saksi yang hanya menggunakan resume penyidik untuk melakukan analisis. Majelis hakim pimpinan Hasoloan Sianturi yang menanyakan tanggapan terkait keterangan saksi dari PPATK ini pun langsung ditolak terdakwa. "Saya menolak keterangan saksi ahli ini, karena

tidak bisa membuktikan asal sumber dana dalam transaksi tersebut," ujar terdakwa yang mantan Bupati Klungkung dua kali periode 2003-2008 dan 2008-2013.

Keterangan yang sama juga diungkapkan saksi dari BPKP Bali, Doso Sukendra. Dia mengatakan sempat melakukan audit untuk menghitung kerugian negara dalam pengadaan lahan proyek Dermaga Gunaksa di Desa Gunaksa, Keca-

matan Dawan, Klungkung yang nilainya mencapai Rp 9 miliar. Perhitungan itu sendiri dilakukan berdasarkan BAP penyidik.

Saksi Doso Sukendra juga mengakui hanya sempat melakukan visualisasi ke lokasi pembangunan Dermaga Gunaksa, namun tidak sempat melakukan verifikasi terhadap pemilik-pemilik tanah. Keterangan saksi dari BPKP ini pun ditolak terdakwa Candra. "Saya menolak keterangan saksi BPKP ini karena hanya

menggunakan BAP penyidik sebagai dasar melakukan analisa," tegas Candra yang ditanya majelis hakim tentang tanggapannya atas keterangan saksi.

Ditemui NusaBali sesuai sidang kemarin, kuasa hukum terdakwa yakni Suryatin Lijaya mengatakan pihaknya meragukan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Khusus untuk saksi ahli dari PPATK, Suryatin mempertanyakan dasar analisisnya yang hanya didasarkan pada resume penyidik. Saksi juga tidak bisa menjelaskan sumber dana dalam transaksi tersebut.

"Hasil yang disampaikan hanya berupa dugaan dan bukan pembuktian. Dugaan itu yang seharusnya dibuktikan, apakah kekayaan itu dari hasil pidana atau tidak," sindir Suryatin. Sidang kasus ini akan kembali dilanjutkan, Rabu (15/4) depan, dengan agenda pemeriksaan saksi ahli lainnya.

Sementara itu, sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Gunaksa de-

Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 1



ngan terdakwa Tim Sembilan (9 mantan pejabat Pemkab Klungkung yang masuk panitia pengadaan lahan), akan digelar di Pengadilan Tipikor Denpasar, Jumat (10/4) ini. Para mantan pejabat dalam Tim 9 yang bakal disidangkan hari ini termasuk di antaranya trio Ketut Janapria (mantan Sekda Klungkung yang bertindak sebagai Ketua Tim 9), Nyoman Rahayu (mantan Kadis DKP Klungkung selaku anggota Tim 9), dan AA Ngurah Agung (mantan Kadis PU Klungkung selaku anggota Tim 9).

Sedangkan 6 tersangka lagi dari Tim 9 masing-masing I Made Ngurah (mantan Asisten I Tata Pemerintahan Pemkab Klungkung/bertindak sebagai Wakil Ketua Tim 9), AA Sagung Mastini (mantan Kepala BPN Klungkung/sebagai Wakil Ketua Tim 9), I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9), I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil

Sekretaris Tim 9), I Made Sugiarta (mantan Kepala Bappeda Klungkung/anggota Tim 9), dan I Nyoman Sukantra (mantan Kepala Badan Pendapatan Klungkung/anggota Tim 9).

Para tersangka Tim 9 yang bakal disidangkan hari ini dibagi menjadi tiga berkas perkara terpisah. Berkas pertama, terdiri dari tiga tersangka yakni Ketut Janapria, I Made Ngurah, dan AA Sagung Mastini. Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari Beslin Sihombing (ketua), Sumadi (anggota), dan Hartono (anggota).

Sedangkan berkas perkara kedua berisi empat tersangka, masing-masing Nyoman Rahayu, AA Ngurah Agung, Made Sugiarta, dan Nyoman Sukantra. Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari I Putu Gede Haryadi (ketua), Guntur (anggota), dan Miptahul Holis (anggota).

Sementara berkas perkara ketiga berisikan dua tersangka, masing-masing I Gusti Ngurah Gede (mantan Kasi BPN Klungkung/sebagai Sekretaris Tim 9) dan I Gusti Gede Wiratmaja (mantan Kabag Tapem Klungkung/Wakil Sekretaris Tim 9). Majelis hakim yang akan menyidangkan mereka terdiri dari Cening Budiana (ketua), Miftahul (anggota), dan Nurbaya (anggota).

Pihak kejaksaan telah menunjuk 12 jaksa untuk keroyok 9 mantan pejabat Pemkab Klungkung dalam Tim 9 ini di Pengadilan Tipikor nanti. Para jaksa itu diambil dari Kejari Klungkung dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Menurut JPU dari Kejari Klungkung, Suhadi SH, tim jaksa ini sama dengan perkara untuk terdakwa mantan Bupati Candra. "Kalau JPU sama dengan JPU kasus dengan terdakwa Candra," ujar Suhadi yang juga Kasi Intel Kejari Klungkung.

Para jaksa yang akan dilibatkan menghadapi tersangka Tim 9, antara lain, I Made Pasek SH (Kasi Pidsus Kejari Klungkung), Ade Nandar Silitonga SH (Kasi Pidum Kejari Klungkung), Dicky Iskandar Andi Firmansyah (Kasi Datun Kejari Klungkung), dan Suhadi sendiri (Kasi Intel Kejari Klungkung). rez



Seminggu, Air Telaga Waja Macet Mengalir di Muncan

AMLAPURA, NusaBali

Setidaknya sejak seminggu terakhir, air dari mata air Sungai Telaga Waja, yang dialirkan di Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangaem, macet. Akibatnya masyarakat banyak yang tidak kebagian suplai air. Padahal debit air yang tersalurkan cukup besar karena berasal dari lima mata air.

Perbekel Muncan, Kecamatan Selat, I Gusti Lanang Ngurah mengeluhkan, belum ada penanganan untuk kelancaran suplai air ke rumah-rumah. Gusti Lanang menuturkan di Amlapura, Kamis (9/4), sejak seminggu, suplai air dari proyek Sungai Telaga Waja, tidak mengalir. "Kami mesti mengadu ke mana, airnya tak kunjung mengalir," keluh Gusti Lanang.

Apalagi, terkait macetnya suplai air itu, juga tanpa ada pemberitahuan dari pihak pengelola. Desa Muncan yang mewilayah 22 banjar adat, warga masyarakat meski mengambil air ke pancuran terdekat sep-

erti di Mata Air Petung.

Kepala Dinas PU Karangasem I Nyoman Sutirtayasa dihubungi, mengaku masih mengkoordinasikan kepada instansi yang membidangi. Sebab, selama ini empat lembaga yang mengurus proyek air Sungai Telaga Waja, yakni: Balai Wilayah Sungai Bali-Penida, Dinas PU Provinsi Bali, PK PAM (Peningkatan Kinerja Perusahaan Air Minum) dan UPT (Unit Pelaksana Teknik) Provinsi Bali. "Untuk sementara saya mohon maaf dulu, belum bisa bersedia memberikan penjelasan akurat," pinta Sutirtayasa.

Berbeda dengan pelayanan di Desa Duda, Kecamatan Selat, tetap lancar. "Pelayanan di sini tidak ada masalah, airnya lancar, saya tidak tahu di tempat lain," ujar I Gusti Agung Ngurah Agung, tokoh dari Banjar/Desa Duda, Kecamatan Selat. Selama ini masyarakat pihak PDAM Karangasem telah menyambungkan 5.000

sambungan sejak dioperasikan proyek Air Baku Sungai Telaga Waja, dari 20.000 daftar tunggu sejak tahun 2010. Sambungan air bersih itu, untuk Kecamatan Selat sebanyak 2.000 sambungan, Kecamatan Sidemen sebanyak 1.000 sambungan, Kecamatan Rendang sebanyak 1.000 sambungan, selebihnya di Kecamatan Bebandem.

Teknisnya, PDAM membeli air curah dari UPT (Unit Pelaksana Teknis) Provinsi Bali, yang mengelola air baku Sungai Telaga Waja, per meterkubik Rp 2.000. Walau PDAM Karangasem selama ini menjual air ke pelanggan rumah tangga dengan tarif 0-10 meterkubik, per meter kubik Rp 1.500, sedangkan 11-20 meterkubik per meterkubik Rp 2.275, dan 21 meter kubik ke atas Rp 4.150. Sehingga ada subsidi untuk pemakaian 0-10 meterkubik.

Proyek Sungai Telaga Waja itu yang diawali tahun 2007, tahap I biaya Rp 10

miliar, dan tahap II tahun 2008 biaya Rp 10 miliar, dilanjutkan tahun 2009-2012, total biaya Rp 133,5 miliar. Proyek itu sendiri memanfaatkan, lima mata air: masing-masing: Mata Air Isah (94 liter perdetik), Mata Air Celuk (104 liter perdetik), Mata Air Bangol (119 liter perdetik), Mata Air Surya (146 liter perdetik) dan Mata Air Gerubuk (170,9 liter perdetik, lokasinya di Desa Adat Tegenan, Kecamatan Rendang.

Air itu diangkat menggunakan genset melalui transmisi I (RT I) kapasitas 100 meterkubik, menuju reservoir transmisi II (RT II) Dusun Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, kapasitas 10.000 meterkubik. Juga telah dibangun reservoir transmisi di Desa Muncan (10.000 meterkubik), dan lima bak penampungan air baku. Lima bak tersebut di Dusun Susut (Desa Muncan, Kecamatan Selat), dan empat bak di Desa Besakih (Kecamatan Rendang). **k16**

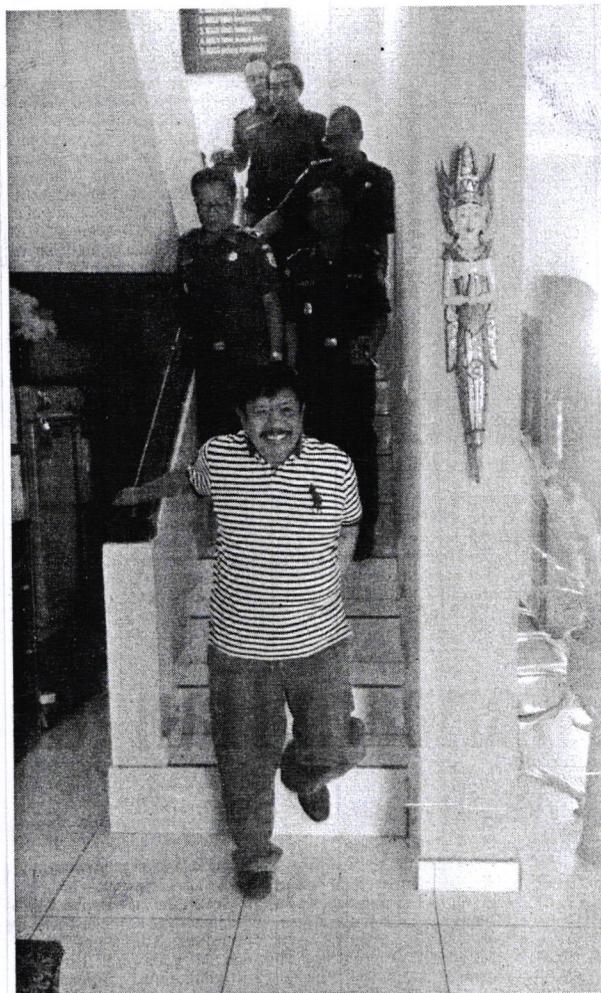
Edisi : Jumat, 10 April 2015

Hal : 3



Winasa Diperiksa 5 Jam

★ Dicecar 45 Pertanyaan Kasus Beasiswa
STITNA dan STIKES



MANTAN Bupati Jembrana, Gede Winasa menuruni tangga usai menjalani pemeriksaan oleh Kejati Bali di Kejari Negara, Kamis (9/4).

Edisi : Jumat, 10 April 2015
Hal : 7



Sambungan - -

Usai diperiksa penyidik Pidsus Kejati Bali, rencananya Winasa langsung diperiksa penyidik Pidsus Kejari Negara selaku tersangka kasus dugaan korupsi SPPD. Namun agenda pemeriksaan diundur karena Winasa tak siap.

NEGARA, NusaBali

Mantan Bupati Jembrana, Prof Drg I Gede Winasa kembali terantuk kasus dugaan korupsi. Kali ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali memeriksa Winasa sebagai saksi atas dugaan korupsi beasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Teknik Negara (STITNA) dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) pada tahun 2009 dan 2010. Penyidik mencecar mantan penguasa itu dengan 45 pertanyaan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana, Kamis (9/4).

Petugas menjemput Winasa ke Lapas Negara dengan mobil operasional Kejati Bali untuk dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara. Mantan Bupati Jembrana dua periode (2000-2005 dan 2005-2010) ini mendapat pengawasan ketat dari dua orang polisi bersenjata laras panjang. Winasa tiba di Kejari Negara sekitar pukul 11.00 Wita dan langsung diajak naik ke lantai dua guna menjalani pemeriksaan di ruang Pidsus. Hanya saja dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi beasiswa kemarin, Winasa diperiksa bukan sebagai tersangka tetapi sebagai saksi dari dua tersangka yakni mantan Kadis Dikporparbud Jembrana, I Nyoman Suryadi dan Anak Agung Putra Yasa.

Skenario sebelumnya, setelah pemeriksaan dari penyidik Pidsus Kejati Bali, Winasa langsung diperiksa tim penyidik Pidsus Kejari Jembrana selaku tersangka kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kepala Daerah Jembrana tahun 2009 dan 2010. Namun agenda pemeriksaan dari Kejari Negara itu tidak jadi dilakukan hari itu alias diundur karena pemeriksaan dari Kejati Bali berlangsung lama. Dimana, Winasa baru selesai diperiksa dalam kaitan kasus beasiswa pukul 16.00 Wita atau selama 5 jam. Ketika akan mau diperiksa terkait kasus SPPD, Winasa menyatakan tidak siap

untuk diperiksa.

Salah satu tim penyidik Pidsus Kejati Bali, Gede Arthana, mengakui Winasa diperiksa selaku saksi dalam kasus beasiswa di STITNA dan STIKES. Menurutnya, ada 45 pertanyaan yang dilayangkan ke Winasa seputar keterlibatan dua tersangka mantan Kadis Dikporapabud Jembrana. "Ini baru sebagai saksi, bukan tersangka. Nanti kalau tersangkanya, kita lihat jadwal," katanya.

Sementara Winasa se usai pemeriksaan tidak mau berkomentar banyak. Mantan suami Bupati Banyuwangi Ratna Ari Lestari ini mengaku dalam keadaan sehat dan sangat baik. Mengenai materi pemeriksaan, Winasa menjawab semua berjalan lancar, dan diakui diperiksa sebagai saksi. "Ditanya seputaran yang dua itu (Suryadi dan Putra Yasa)," ujar Winasa, sembari bergegas masuk ke mobil operasional Kejari Negara untuk dikembalikan ke Lapas Negara.

Sementara Kajari Negara, Teguh Subroto mengakui mendajwalkan pemeriksaan terhadap Winasa terkait kasus SPPD, Kamis kemarin. Rencananya Winasa menjalani pemeriksaan perdana selaku tersangka setelah sempat tiga kali gagal diperiksa dengan alasan pengacara. "Sudah tiga kali gagal kita periksa. Sekarang ini, habis dari Kejati, maunya kita periksa. Kita juga sudah tunjuk pengacara, Pak Ketut Nurlaba, agar bisa kita periksa langsung. Dia (Nurlaba) juga sudah siap," katanya.

Teguh mengakui pemeriksaan kemarin urung dilaksanakan. Terkait dugaan korupsi SPPD yang membelit Winasa, Teguh mengatakan ada tersangka baru di kasus itu. Hanya saja, ia tidak berani memastikan berapa jumlah tersangka dan siapa tersangka tersebut. "Nanti tergantung dari hasil pemeriksaan Pak Winasa. Kita pastikan ada tersangka baru," tandas Teguh Subroto. Jadwalnya, Winasa akan kembali diperiksa pada hari Kamis (16/4) mendatang. **od**

Edisi : Jumat, 10 April 2015
Hal : 7